



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## ANCAMAN KEKERINGAN TAHUN 2024 TERHADAP SEKTOR PERTANIAN PANGAN

**Teddy Prasetiawan**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[teddy@dpr.go.id](mailto:teddy@dpr.go.id)

**Rizki Mona Syawlia**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[rizki.syawlia@dpr.go.id](mailto:rizki.syawlia@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa sebagian wilayah Indonesia telah masuk pada musim kemarau. Berdasarkan jumlah Zona Musim (ZOM), sebanyak 64% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Di samping itu, BMKG menyampaikan bahwa meskipun Indeks *dipole mode* dan indeks ENSO (*El Niño-Southern Oscillation*) berada dalam kondisi netral, ada kemungkinan transisi ke fase La Nina lemah pada bulan Juli hingga September. Namun, dampaknya diprediksi tidak signifikan terhadap musim kemarau. BMKG menyampaikan peringatan dini kekeringan meteorologis di beberapa wilayah Indonesia, dengan klasifikasi tingkat kewaspadaan. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat, berada dalam kategori 'waspada' dan diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berkepanjangan. Kondisi ini merupakan kombinasi dari fenomena perubahan iklim dan fenomena El Niño. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi kekeringan di beberapa wilayah tersebut perlu ditingkatkan, terutama di wilayah yang sudah memasuki musim kemarau lebih awal.

Kekeringan ekstrim telah terbukti terkait langsung dengan penurunan produksi padi nasional. Pada tahun lalu, penurunan produksi padi di sentra pangan, seperti Provinsi Jawa Barat, dipicu oleh kekeringan yang berkepanjangan yang menyebabkan gagal tanam dan gagal panen. Ini berdampak pada *minimum secured* Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton tidak terpenuhi sehingga pemerintah kembali mengimpor 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton sepanjang tahun 2023. Pada awal musim kemarau tahun ini, gagal panen mulai kembali menghantui Provinsi Jawa Barat. Ribuan hektare lahan pertanian padi di Kabupaten Bandung Barat dilanda kekeringan. Kemarau berkepanjangan serta tingginya sedimen dinilai membuat daerah irigasi Leuwi Kuya di Soreang, Kabupaten Bandung, tidak beroperasi. Padahal, irigasi ini mengairi kurang lebih 2.300 hektare sawah. Ratusan hektare sawah di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu juga terancam gagal panen jika belum ada pasokan air ke areal persawahan dalam seminggu ke depan. Bahkan, puluhan hektare sawah di Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, telah mati akibat kekurangan pasokan air yang menyebabkan para petani terpaksa mencabut bibit yang masih tumbuh untuk dipindahkan ke lokasi lain. Petani hanya bisa mengandalkan air dari Sungai Ciherang yang jaraknya cukup jauh.

Kekeringan juga melanda daerah lain, seperti di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang mengalami kerusakan parah pada 98 hektare lahan sawah akibat irigasi Waduk Pacal yang hanya mampu mengairi tanaman palawija dan 148 embung lainnya di Bojonegoro yang telah mengalami kekeringan. Lebih awal dari itu, Kabupaten Lombok Barat mengalami puso atau gagal panen yang mencapai 105 hektare sawah sejak bulan Juli lalu. Bantuan pompa air oleh Dinas Pertanian setempat tidak berhasil menyelamatkan tanaman padi yang telah terlanjur mengering. Persawahan yang mengering mendorong petani berunjuk rasa di Sukoharjo, Jawa Tengah. Rencana penutupan pintu air sementara semasa kemarau di Bendungan Colo diprotes petani karena panennya terancam. Namun, penutupan itu mesti dilakukan agar bendungan tidak bertambah kritis.

Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan upaya cepat untuk mengatasi masalah ini. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu lebih masif memberikan bantuan pompa air darurat ke titik-titik rawan kekeringan untuk mencegah tanaman padi mati. Selain itu, pemerintah diharapkan fokus pada pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendungan, embung, dan saluran irigasi yang menampung dan menyalurkan air untuk kebutuhan pertanian. Pemerintah pusat juga perlu memastikan alokasi anggaran terkait insentif khusus bagi petani yang mengalami gagal panen, seperti yang dilakukan pada tahun 2023. Program insentif ini mencakup bantuan langsung berupa uang tunai senilai Rp 8 juta per hektare lahan yang mengalami gagal panen. Dana ini sangat membantu petani menutup biaya produksi dan memulai kembali kegiatan pertanian mereka. Hal ini tentunya dilakukan untuk menghindari terputusnya rantai penanaman yang berdampak pada turunnya produktivitas padi nasional secara drastis. Dalam jangka panjang, selain bantuan tunai, pemerintah juga tengah mengupayakan perluasan skema asuransi pertanian. Skema ini mencakup berbagai risiko gagal panen, termasuk kekeringan, sehingga siklus tanam-panen diharapkan tidak akan terganggu. Pada tahun 2024, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk mendukung program ini. Pada akhirnya, upaya kolaboratif dari pemerintah, DPR, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk kekeringan terhadap produktivitas pangan nasional.

## Atensi DPR

Saat ini Indonesia tengah menghadapi fase awal musim kemarau. Sebanyak 64% wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Bahkan, beberapa daerah sudah berstatus waspada. Meskipun BMKG memprediksi kombinasi dari fenomena perubahan iklim dan fenomena El Niño tidak signifikan terhadap musim kemarau, beberapa daerah yang merupakan sentra pangan nasional mulai mengalami ancaman gagal panen. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam menghadapi kondisi ini agar wilayah yang mengalami kekeringan dan gagal panen tidak semakin meluas. DPR RI, melalui Komisi IV, perlu memastikan bahwa program bantuan pompanisasi terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kekeringan dalam jangka pendek. Selain itu, pembangunan infrastruktur keairan perlu terus menjadi fokus pemerintah. Komisi IV DPR RI juga perlu memastikan alokasi anggaran terkait insentif khusus bagi petani yang mengalami gagal panen, seperti yang dilakukan pada tahun 2023. Pengembangan skema asuransi pertanian yang mencakup risiko kekeringan juga perlu mendapatkan prioritas pemerintah untuk mengatasi ancaman kekeringan sektor pertanian pangan dalam jangka panjang.

## Sumber

antaranews.com, 28 Mei 2024;  
bmgk.go.id, 23 Agustus 2024;  
cnbcindonesia.com, 24 Agustus 2024;  
emedia.dpr.go.id, 20 Mei 2024;

kompas.id, 24 Agustus 2024;  
mediaindonesia.com, 22 Agustus 2024; dan  
tribunnews.com, 18 Agustus 2024;



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.